KEPALA DESA MEKARRAHAYU
KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MEKARRAHAYU (RKP Desa) TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan visi-misi desa yang telah disepakati bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perlu dirumuskan pelaksanaan pembangunan baik skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan baik dalam skala desa dan atau skala kecamatan/kabupaten, diperlukan pelaksanaan yang sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan baik fisik, ekonomi, sosial dan budaya, yang telah terakomodir dalam RPJM Desa, maka perlu dibuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa);

c. bahwa RKP Desa tersebut merupakan Rencana Strategis Pembangunan Tahunan Desa yang menggambarkan arah prioritas kebijakan desa berkait dengan prioritas program dan kegiatan serta kemampuan pendanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mekarrahayu Tahun 2016.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
20. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Perubahan RPJM Desa tahun 2015 – 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Bandung.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
8. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpangan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
20. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
21. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
23. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

24. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
27. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Mekarrahayu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENGANTAR
   - Pendahuluan
   - Dasar Hukum
   - Tujuan dan Manfaat
   - Visi – Misi Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
   - Kebijakan Pendapatan Desa
   - Kebijakan Belanja Desa

c. BAB III : EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN
   - Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDes Tahun sebelumnya
   - Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes
   - Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.
   - Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa.

d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
   - Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Desa Tahun berjalan

- Prioritas Program dan Kegiatan Sekala Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang/ Sektor

e. BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Berita Acara Penyusunan RKPDes melalui Musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif Desa
3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk ke desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Daftar usulan RKP Desa
6. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa
7. Berita acara rancangan RKP Desa melalui Musrenbang Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Peraturan Desa yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa tahun 2015 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan LPMD dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2016.

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini yang selanjutnya disusun Rencana Program/ Kegiatan dan dimasukan dalam APB Desa Tahun anggaran 2016.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan tersebut dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan dan pengguna angaran lainnya dengan penggunaan dana melalui penyusunan RAB (Rencana Anggaran Belanja)

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP Desa

Pasal 6

(1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh BPD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa;

(2). Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Forum Musrenbang desa dalam Perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Desa RKP Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Mekarrahayu
Pada Tanggal : 16 Januari 2016
Kepala Desa Mekarrahayu

ttd

HERRY HERYADI

Diundangkan di Desa Mekarrahayu
Pada Tanggal 16 Januari 2016
Sekretaris Desa,
ttd

ADE MUHYI

BERITA DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 2 TAHUN 2016

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2016

DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG
2016

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN 2016

DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG
2016

BAB I

PENGANTAR

1.1 PENDAHULUAN.

Mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 tentang Petunjuk teknis tentang pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 Desa, yang telah mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Perencanaan Pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten dan merupakan bagian sistem perencanaan pembangunan nasional. Melaksanakan peraturan tersebut yang pada prinsipnya sebuah kebijakan sangat mendasar dimana masyarakat pedesaan/desa diberikan peran yang lebih banyak didalam menentukan perencanaan pembangunanya yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan program ini sangat tergantung kepada kesiapan masyarakat sendiri, terutama menyangkut tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu Sumber daya, Manusia dan Potensi yang ada.

Dalam melaksanakan dan mencapai sasaran di atas, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah desa secara umum masih banyak permasalahan yang dihadapi terutama dari lingkungan internal masyarakat dan pemerintah daerah yang diperkirakan akan mengurangi daya capai pengembangan Otonomi Desa.

Pada umumnya unsur yang menjadi permasalahan pemerintahan dan pembangunan desa adalah :

1. Kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa yang masih belum memenuhi harapan dan diberdayakan secara optimal.
2. Penduduk miskin di pedesaan cukup besar sehingga muncul kesenjangan dalam prilaku sosial antropologi antara kaya dengan miskin.
3. Sarana Infrastruktur yang masih perlu diperbaiki.
4. Kurangnya Pemanpaatan perencanaan tingkat desa, sehingga sering berakibat pada sinkronisasi antara output implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.
5. Sumber Daya Manusia masyarakat yang masih belum dimanfaatkan secara optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Atas dasar pemikiran di atas maka dalam rangka memberikan kesamaan persepsi, dalam Perencanaan, Penggalian Potensi, identifikasi, analisis masalah, menentukan skala prioritas masalah dan sampai pemecahan masalah menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dikemas dalam sebuah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang lebih jauhnya diharapkan bisa menjadi koridor dan arah pembangunan selama kurun waktu 6 (Enam) tahun kedepan dengan diaktualisasikan dan diimplementasikan melalui berbagai program, yang sinergis, terkoordinasi, terarah, epektif, efisien, dan akuntable.

1.2 DASAR HUKUM.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini adalah :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2581) ;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
15. Peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transfaransi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006, tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peratauran daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007, tentang Pedoman Pembentukan dan Penyusunan Peraturan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT

1.3.1 Maksud.

1. Pedoman untuk arah Pembangunan Desa.
2. Pedoman, sekaligus arah untuk menentukan kebijakan desa tentang pembangunan di segala bidang
3. Menganalisis Masalah dan Potensi serta menentukan skala Prioritas Pembangunan Desa.

1.3.2 Tujuan.

1. Menampung dan menetapkan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat desa.
2. Menetapkan kegiatan prioritas Desa yang akan diajukan baik yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa, Swadaya Masyarakat, bantuan APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainya.
3. Menetapkan kegiatan Prioritas yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan.
4. Mengakselarasikan Visi dan Misi Kepala Desa sehingga arah dan program menyatu dan mempunyai arah kebijakan yang terpadu, dan mempunyai pedoman dalam melaksanakan program kerja ke depan.
5. Merumuskan Rencana Pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
7. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
8. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
9. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa.
10. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan desa.
11. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.
12. Menghindari tumpang tindih kegiatan atau program yang didanai APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB-Desa dan swadaya masyarakat, sehingga program dapat berjalan sinergis, terpadu dan berkelanjutan.

1.3.3 Sasaran.

Sasaran dari Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini adalah dalam rangka memberikan kesamaan persepsi, baik dalam Perencanaan, Penggalian Potensi, Mengidentifikasi, Analisis masalah, menentukan skala prioritas masalah sampai pemecahan masalah menjadi satu kesatuan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja selama 1 (Satu) tahun sesuai dengan Visi misi Kepala Desa.

Secara Garis besarnya, dengan dibuatnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2016 ini adalah :

1. Mempercepat terwujudnya kesejahateraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta mayarakat.
2. Memelihara stabilitas masyarakat yang aman, tertib damai dan sejahtera.
3. Mengoptimalkan kegitan kelembagaan yang ada di desa.
4. Menggali dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebersamaan dan memantapkan aktualisasi pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan pemerintahan, pengelolaan, perencanaan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja pembangunan desa.
7. Meningkatkan sumber daya manusia.

1.3.4 Visi – Misi Desa

VISI.

Diatas telah disampaikan, bahwa kepala desa adalah unsur utama (Domain) pelaksana pemerintahan desa, yang harus menggambarkan dan bisa melaksanakan 5 (lima) prinsip ***(Keanekaragaman, Partisifasi, Otonomi Asli, Demokrasi dan***

pemberdayaan mayarakat) dalam berbagai tindakan dan pemikirannya melalui keputusan-keputusannya, dalam rangka memberikan kebebasan, penggalangan dan penggalian partisifasi serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat desa lebih maju, sejahtera pada berbagai aspek kehidupan.

Maka seorang kepala desa sebagai pemimpin mempunyai fungsi pokok, diantaranya yaitu :

1. **Menentukan Tujuan ;** Menentukan batasan atau mengindentifikasikan maksud, tujuan dan sasaran pemerintahan Desa.
2. **Merencanakan ;** Memastikan bahwa ada rencana yang disetujui oleh semua pihak. Kepala desa harus mengetahui apa yang akan dicapainya, bagaimana memulainya dan bagaimana berhentinya.
3. **Mengontrol ;** Mengontrol, mengawasi dan memantau semua yang mengacu kepada pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
4. **Mengevaluasi ;** Evaluasi ini digunakan sebagai bahan yang bermanfaat untuk memberikan feedback bagi masyarakat dengan harapan memperbaiki kekurangan dan menghasilkan suatu yang lebih baik.

Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan, Kepala desa/pemerintahan desa harus mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai.Adapun Visi dan misi Desa Mekarrahayu adalah sebagai berikut :

Visi.

"PENGGALIAN POTENSI DESA, DENGAN MENGELOLA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM BERBAGAI ASPEK, DEMI KEMAJUAN DESA, SEHINGGA TERCIPTA MASYARAKAT DESA YANG TENTRAM LAHIR DAN BATIN".

Misi.

Misi Kepala Desa Mekarrahayu adalah sebagai berikut :

" Meningkatkan pendapatan Asli Desa melalui optimalisasi dan pengamanan sumber-sumber pendapatan, menata administrasi desa, RW, RT serta kependudukan dan membina serta mengembangkan potensi keagamaan, seni budaya, olahraga, ekonomi kerakyatan, kemanan dan ketertiban"

Untuk melaksanakan Visi tersebut, lebih jelasnya dapat kami sampaikan misi dari Kepala Desa adalah sebagai berikut :

1. Mengintensifkan dan mengamankan potensi sumber pendapatan desa, dengan cara lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa, baik yang berasal dari Sumber Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun bantuan dari pihak ketiga, sehingga dapat direalisasikan dan diimplemtasikan bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. Menata administrasi desa, RW, RT melalui cara optimalisasi fungsi dan tugas aparat pelaksananya sehingga tercipta sebuah tatanan administrasi pemerintahan yang baik, akuntabilitas, terstruktur dengan didukung oleh sarana dan prasarana penunjangnya.
3. Menumbuhkembangkan pembinaan serta menggali potensi keagamaan melalalui kerjasama dengan DKM, MUI, DMI, Ulama dan Pembina keagamaan.
4. Menumbuhkembangkan pembinaan potensi seni dan budaya yang sudah ada, atau penciptan seni dan budaya baru yang berorientasi pada kemajuan dan pembendaharaan seni maupun budaya yang tidak bertentangan dengan adat maupun kebiasaan warga masyarakat serta tetap mempertahankan kearipan budaya lokal.

5. Menumbuhkembangkan dan membina potensi olahraga, dengan cara lebih meningkatkan minat serta apresiasi para pemuda terhadap bidang olahraga dan berupaya untuk memfasilitasinya baik dari kegiatan, sarana maupun pendanaannya.
6. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi kerakyatan yang sudah ada seperti pengrajin topi, makanan, meubel dan berusaha menggali dan menciptakan sumber-sumber perekonomian yang baru sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui upaya pembinaan, dan peningkatan kesadaraan pengamanan swakarsa atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Kebijakan Pendapatan Desa Mekarrahayu yang akan dituangkan dalam Rencana Pendapatan Dan Velanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016, diharapkan dapat dipenuhi dari sumber-sumber pendapatan antara lain:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat.
3. Bantuan Keuangan dari Provinsi.
4. Bantuan Keuangan dari Kabupaten.
5. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga.
6. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Adapun gambaran Pendapat Desa Mekarrahayu tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	148.940.000
2.	Dana Desa	Rp.	814.025.90
3.	Bagian dari hasil Pajak Daerah	Rp.	117.509.200
4.	Bagian dari hasil Retribusi Daerah	Rp.	10.060.000
5.	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	1.128.466.800
6.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	Rp.	115.000.000
7.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp.	55.000.000
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp.	**2.389.002.700**

2.2 KEBIJAKAN BELANJA DESA

Pendapatan Desa tersebut, akan digunakan dan dialokasikan untuk kegiatan dalam bidang Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	939.541.800,00
2.	Bidang Pembangunan	Rp.	1.319.945.900,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	77.550.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	Rp.	16.625.000,00
5.	Bidang Tak Terduga	Rp.	35.340.000,00
6.	Jumlah Belanja	Rp	**2.389.002.700,00**
7.	Surplus / Defisit	Rp.	0,00
8.	Pembiayaan Desa	Rp.	0,00
9.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0,00
10.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
11.	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

BAB III

EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan baik dalam target anggaran yang diharapkan maupun realisasi penggunaannya pada tahun Anggaran 2015, pada dasarnya sudah dilaksanakan dan dapat terpenuhi sesuai dengan rencana.

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKPDesa Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber
1.	Rehab rumah milik Bapak Adeng	10.000.000	10.000.000	RDS
2.	Rehab rumah milik Bapak Ayin	10.000.000	10.000.000	RDS
3.	Rehab rumah milik Ibu Sukarmiati	10.000.000	10.000.000	RDS
4.	Rehab rumah milik Ade Yana	10.000.000	10.000.000	RDS
5.	Pembuatan SPAL	10.000.000	10.000.000	RDS
6.	Pembuatan SPAL	10.000.000	10.000.000	RDS
7.	Rabat beton gang	10.000.000	10.000.000	RDS
8.	Rabat beton gang	10.000.000	10.000.000	RDS
9.	Pembuatan SPAL	10.000.000	10.000.000	RDS
10.	Rehab rumah milik Bapak Rosid	7.500.00	7.500.00	ABT
11.	Rehab rumah milik Ibu Omah	7.500.000	7.500.000	ABT
12.	Rehab rumah milik Bapak Aju	7.500.000	7.500.000	ABT
13.	Rehab rumah milik Bapak Uoh	7.500.000	7.500.000	ABT
14.	Rehab rumah milik Bapak Usep. R	7.500.000	7.500.000	ABT
15.	Pembangunan Jembatan	70.000.000	70.000.000	DD
16.	Rabat beton	43.000.000	43.000.000	DD
17.	Rabat beton Jl. Delim	34.000.000	34.000.000	DD
18.	Rabat beton Jl. CCI I	45.271.000	45.271.000	DD
19.	Rabat beton Jl. Gang	12.500.000	12.500.000	DD
20.	Rabat beton Jl. Gang	12.500.000	12.500.000	DD
21.	Pembuatan SPAL	20.000.000	20.000.000	DD
22.	Pembuatan SPAL	24.000.000	24.000.000	DD
23.	Rabat beton Jl. Gang	12.500.000	12.500.000	DD
24.	Kirmir Selokan	25.000.000	25.000.000	DD
25.	Penyediaan sarana KBM	10.000.000	10.000.000	ADPD
26.	Rehab rumah milik Ibu Omah	10.000.000	10.000.000	ADPD
27.	Rehab Rumah milik ibu Sa'in	10.000.000	10.000.000	ADPD
28.	Rehab rumah milik Bapak Tata	10.000.000	10.000.000	ADPD
29.	Rehab rumah milik Ibu Cucu	10.000.000	10.000.000	ADPD
30.	Pembuatan tempat pembakaran sampah	5.000.000	5.000.000	ADPD
31.	Rabat beton Jalan Gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
32.	Rabat beton Jalan Gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
33.	Pengecatan Gedung Serbaguna Desa	10.400.000	10.400.000	ADPD
34.	Rabat beton Jalan gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
35.	Rabat beton Jalan Gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
36.	Rabat beton Jalan Gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
37.	Rabat beton Jalan Gang	11.000.000	11.000.000	ADPD
38.	Peningkatan SDM Aparatur Desa	4.625.000	4.625.000	ADPD
39.	Penyusunan Profil Desa	2.000.000	2.000.000	ADPD
40.	Kegiatan kesekretariatan PKK	3.000.000	3.000.000	ADPD

41.	Kegiatan Pokja I PKK	2.500.000	2.500.000	ADPD
42.	Kegiatan Pokja II PKK	2.500.000	2.500.000	ADPD
43.	Kegiatan Pokja III PKK	1.500.000	1.500.000	ADPD
44.	Kegiatan Pokja IV PKK	10.000.000	10.000.000	ADPD
44.	Bulan Bhakti Gotong Royong	1.500.000	1.500.000	ADPD
46.	Lomba Desa	1.000.000	1.000.000	ADPD
47.	Kegiatan Pemuda dan Olahraga	6.325.000	6.325.000	ADPD
48.	Penunjang kegiatan seni budaya	5.625.000	5.625.000	ADPD
49.	Peningkatan kapasitas kelembagaan	12.666.800	12.666.800	ADPD
50.	Pengadaan pakaian dinas Perangkat Ds	4.500.000	4.500.000	ADPD
51.	Pengadaan alat kebersihan	1.000.000	1.000.000	ADPD
52.	Perjalanan dinas perangkat desa	1.500.000	1.500.000	ADPD
53.	Pengadaan Sound System	22.200.000	22.200.000	ADPD
54.	Pengadaan CC TV	6.660.000	6.660.000	ADPD
55.	Pengadaan Printer	3.000.000	3.000.000	ADPD
56.	Pengadaan buku registrasi lembaga	4.500.000	4.500.000	ADPD
57.	Penyusunan Perdes	2.500.000	2.500.000	ADPD
58.	Pelaksanaan MUSRENBANGDES	2.000.000	2.000.000	ADPD
59.	Penunjang kearsipan dan perpustakaan	1.500.000	1.500.000	ADPD
60.	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	689.200	689.200	ADPD
61.	Siltap Aparatur Pemdes	282.600.000	282.600.000	ADPD
62.	Penunjang kegiatan Lansia	3.000.000	3.000.000	ADPD
63.	Bantuan GAKINDA	6.000.000	6.000.000	ADPD
64.	Kegiatan Operasional KIA dan KB	5.000.000	5.000.000	ADPD
65.	Penataan POSYANDU dan PMT	31.200.000	31.200.000	ADPD
66.	Peningkatan Pendidikan Dasar	25.100.000	25.100.000	ADPD
67.	Operasional POS PAUD Plamboyan 13	1.100.000	1.100.000	ADPD
68.	Pemeliharaan Kendaraan Operasional	9.744.300	9.744.300	ADPD
69.	Operasional LPMD	12.000.000	12.000.000	ADPD
70.	Tunjangan BPD	57.900.000	57.900.000	ADPD
71.	Operasional RT dan RW	255.600.000	255.600.000	ADPD
72.	Operasional Kantor (ATK dll)	5.275.900	5.275.900	ADPD
73.	Belanja POS	1.020.000	1.020.000	ADPD
74.	Pemeliharaan Inventaris Desa	4.000.000	4.000.000	ADPD
75.	Rekening Listrik	8.400.000	8.400.000	ADPD
76.	Penunjang Komunikasi/Surat Kabar	1.040.000	1.040.000	ADPD
77.	Pengadaan air minum	1.920.000	1.920.000	ADPD
78.	Foto Copy dan Penjilidan dokumen	1.440.000	1.440.000	ADPD
79.	Tunjangan penghasilan Aparatur Desa	15.000.000	15.000.000	Bangub
80.	Operasional BPD	3.000.000	3.000.000	ADPD
81.	Pembangunan GOR Desa	582.995.000	582.995.000	Swadaya
82.	Perbaikan Jl. Kabupaten	4.580.000.000	4.580.000.000	Binamarga
JUMLAH		**7.597.017.200**	**7.597.017.200**	

Kegiatan Desa Lainnya:

No	Nama Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber
1.	Honor Kegiatan Perangkat Desa	31.060.111	31.060.111	ADD
2.	Kebutuhan ATK Desa	3.451.123	3.451.123	ADD
3.	Pengadaan ATK dan BOP BPD	21.961.695	21.961.695	ADD
4.	Pengeluaran rutin kantor	6.274.770	6.274.770	ADD

5.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	35.850.000	35.850.000	ADD
6.	Peningkatan Pendidikan Dasar	19.500.000	19.500.000	ADD
7.	Menunjang Teknologi tepat guna	3.061.300	3.061.300	ADD
8.	Perawatan Aset Desa	4.325.000	4.325.000	ADD
9.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	3.600.000	3.600.000	ADD
10.	Penyusunan Profil Desa	4.825.000	4.825.000	ADD
11.	Menunjang 10 Program PKK	10.200.000	10.200.000	ADD
12.	Menunjang Kegiatan BBGR	3.000.000	3.000.000	ADD
13.	Menunjang Lomba Desa	13.000.000	13.000.000	ADD
14.	Menunjang kegiatan Lembaga	2.050.000	2.050.000	ADD
15.	Menunjang kegiatan lainnya	15.850.000	15.850.000	ADD
16.	Pengadaan buku administrasi DS & RW	5.850.000	5.850.000	ADD
17.	Rapat dengan Lembaga	4.000.000	4.000.000	ADD
18.	Rapat Pembangunan	3.333.500	3.333.500	ADD
19.	Penunjang kegiatan Perpustakaan Desa	1.750.000	1.750.000	ADD
20.	Laporan ahir tahun	500.000	500.000	ADD
	JUMLAH	**193.392.499,-**	**193.392.499,-**	

3.2 Identifikasi masalah berdasarkan RPJMDes.

3.2.1 Bidang Perekonomian.

1. Beralihnya fungsi lahan pertanian/bercocok tanam menjadi lahan pemukiman mengakibatkan perubahan cara dalam bekerja yang asalnya sebagai petani atau buruh tani menjadi kehilangan mata pencaharian sebagai petani/buruh tani menjadi kuli pabrik, jasa, dagang dll.
2. Dari sebanyak 8.301 masih terdapat sebanyak 806 Kepala Keluarga yang tergolong pada kelompok keluarga miskin.
3. Belum adanya lembaga perekonomian yang memadai, seperti koperasi, bank, dll.
4. Para Pengrajin masih mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya karena terbentur permasalahan permodalan.
6. Masih banyaknya kaum terpelajar dan berpendidikan tinggi yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenjang pendidikannya.

3.2.2 Bidang Kependudukan.

1. Kurang sadarnya sebagian warga dalam hal mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga Kemasyarakatan seperti RT/RW dalam pembuatan bukti administrasi kependudukan.
2. Perbandingan luas wilayah dengan perkembangan penduduk yang kurang seimbang, hal ini dikarenakan angka kelahiran dan banyaknya berdiri komplek pemukiman.
3. Tidak meratanya penyebaran jumlah penduduk antara wilayah satu dengan yang lainnya.
4. Banyaknya penduduk pendatang yang belum memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan oleh per undang-undangan dan aturan kependudukan yang berlaku.

3.2.3 Bidang Pertanian.

1. Semakin sempitnya lahan pertanian, disebabkan alih fungsi menjadi lahan pemukiman.
2. Belum terpolanya jadwal siklus penanaman.
3. Petani pada umumnya menggunakan pola tradisional.
4. Belum memadainya alat-alat pengolahan tanah dan perawatan hingga panen yang memadai.

5. Kelompok Tani (Poktan) yang ada belum bisa berjalan secara optimal.
6. Lahan pertanian yang merupakan lahan setengah irigasi, dan airnya pun sudah tercemar oleh limbah pabrik maupun limbah keluarga.

3.2.4 Bidang Sosial Budaya.

1. Semakin melemahnya sifat gotong royong, disebabkan pengaruh globalisasi.
2. Semakin berkurangnya rasa sosial dan kebersamaan masyarakat, hal ini dikarenakan semakin berbaurnya masyarakat dari berbagai etnis, asal daerah, pendidikan maupun ekonomi dan status sosial.
3. Semakin lunturnya budaya lokal dimasyarakat, terutama generasi muda disebabkan pengaruh budaya luar.
4. Terjadinya perubahan pola kehidupan diberbagai bidang, disebabkan pergaulan, pendidikan, dan informasi yang diterima.

3.2.5 Bidang Pendidikan.

1. Masih ada penduduk usia lanjut yang buta aksara latin.
2. Masih ada anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor ekonomi.
3. Sarana pendidikan yang tersedia, terutama setingkat pendidikan SLTP, SLTA masih sangat kurang.
4. Masih kurangnya lembaga non formal seperti kejar paket A, B, C yang menyelenggaran pendidikan kesetaraan.
5. Masih kurangnya lembaga pendidikan keterampilan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi para usia kerja produktif.

3.2.6 Bidang Kesahatan

1. Belum tersedianya sarana pengobatan yang memadai seperti rumah sakit, dan jumlah balai kesehatan masih sedikit jumlahnya.
2. Masih adanya kebiasaan sebagian masyarakat yang belum sadar dalam hal mengelola dan membuang sampah limbah rumah tangga.
3. Belum tersedianya tempat pengolahan dan pembuangan Akhir (TPA) sampah.
4. Banyak sampah yang datang dan terbawa arus air di selokan dari arah hulu terutama pada musim hujan.

3.3 Identifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

3.3.1 POTENSI.

N0	LOKASI	POTENSI
1	RW 01	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT 3. BANTUAN PEMERINTAH; 4. HOME INDUSTRI DLM BIDANG MEUBELAIR. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
2	RW 02	1. SUMBERDAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT 3. BANTUAN PEMERINTAH 4. HOME INDUSTRI MAKANAN RINGAN DLL. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT.

3	RW 03	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INSDUSTRI DLM BIDANG MEUBELAIR. 5. SARANA PENDIDIKAN. 6. GENERASI MUDA 7. SWADAYA MASYARAKAT
4	RW. 04	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INSDUSTRI DLM BIDANG MEUBELAIR. 5. SARANA PENDIDIKAN. 6. GENERASI MUDA 7. SWADAYA MASYARAKAT 8. OLAHAN MAKANAN RINGAN. 9. TEMPAT WISATA ZIARAH.
5	RW. 05	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INSDUSTRI DLM BIDANG MEUBELAIR, TOPI. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
6.	RW. 06	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INSDUSTRI DLM BIDANG TOPI. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT 7. OLAHAN MAKANAN RINGAN.
7	RW. 07	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. KONVEKSI. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT 7. TEMPAT PERBELANJAAN.
8	RW. 08	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. KONVEKSI. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT 7. TEMPAT PERBELANJAAN.
9	RW. 09	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. KONVEKSI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT 7. TEMPAT PERBELANJAAN.
10	RW. 10	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT.

		3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. KONVEKSI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
11	RW. 11	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. GENERASI MUDA 5. SWADAYA MASYARAKAT
12.	RW. 12	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
13	RW. 13	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
14	RW. 14	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
15	RW. 15	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
16	RW. 16	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
17	RW. 17	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR, TOPI, JAKET, KERUPUK. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
18.	RW. 18	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR, KULIT. 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT

19.	RW. 19	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. SWADAYA MASYARAKAT
20.	RW. 20	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
21	RW. 21	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR, SPARE PART, LOGAM DLL 5. GENERASI MUDA 6. SWADAYA MASYARAKAT
22.	RW. 22	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. BANTUAN PEMERINTAH. 3. HOME INDUSTRI. 4. PERTOKOAN
23	RW. 23	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR. 5. SWADAYA MASYARAKAT 6. GENERASI MUDA.
24	RW. 24	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, ROTI, TISSUE DLL. 5. SWADAYA MASYARAKAT
25	RW. 25	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR. 5. SWADAYA MASYARAKAT 6. GENERASI MUDA.
26	RW. 26	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI. 5. SWADAYA MASYARAKAT 6. GENERASI MUDA.
27	RW. 27	1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. KREATIVITAS MASYARAKAT. 3. BANTUAN PEMERINTAH. 4. HOME INDUSTRI, MEUBELAIR. 5. SWADAYA MASYARAKAT 6. GENERASI MUDA.

3.4 Indentifikasi masalah berdasrkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa.

NO	LOKASI	MASALAH
1	RW 01	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INPRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN. 7. SERING TERJADI BANJIR TERUTAMA SAAT MUSIM HUJAN DIAKiBATKAN OLEH LUAPAN KALI CICUKANG DAN SUNGAI CITARUM YANG KONDISINYA SUDAH SEMAKIN MENYEMPIT DAN DANGKAL.
2	RW 02	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INPRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN. 7. SERING TERJADI BANJIR TERUTAMA SAAT MUSIM HUJAN DIAKiBATKAN OLEH LUAPAN SUNGAI CITARUM YANG KONDISINYA SUDAH SEMAKIN MENYEMPIT DAN DANGKAL.
3	RW 3	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN.
4	RW 4	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG

		MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INPRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
5	RW. 05	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INPRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH. 7. ASSET WISATA ZIARAH BELUM DIKELOLA SECARA MAKSIMAL DAN TERORGANISIR, SEHINGGA BERDAMPAK PADA KURANG TERTATANYA LINGKUNGAN.
6	RW. 06	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
7.	RW. 07	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INPRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MAKANAN KECIL/RINGAN MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN.

		5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
8.	RW. 16	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
8	RW. 17	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH. 7. BELUM TERSEDIANYA SARANA PEMBUANGAN SAMPAH BAIK INDUSTRI MAUPUN RUMAH TANGGA.
9.	RW. 18	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH. 7. BELUM TERSEDIANYA SARANA PEMBUANGAN SAMPAH BAIK INDUSTRI MAUPUN RUMAH TANGGA.

		8. BELUM TERSEDIA SUMBER AIR BERSIH DAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH. 9. SERING TERJADI BANJIR, TERUTAMA PADA MUSIM HUJAN YANG AKIBATKAN OLEH LUAPAN SUNGAI CITARUM.
10.	20.	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
11.	RW. 21	1. BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 3. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 4. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 5. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
12.	RW. 22	1. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 2. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 3. BELUM OPTIMALNYA PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN SEPERTI RT/RW, SEHINGGA BERDAMPAK TERHAMBATNYA PELAKSANAAN PROGRAM SEPERTI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, DAN KESEHATAN.
13.	RW. 23	1. BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 3. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 4. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 5. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
14.	RW. 24	1. BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN.

		3. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 4. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 5. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
15.	RW. 25	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH. 7. SERING TERJADI BANJIR, TERUTAMA PADA MUSIM HUJAN YANG AKIBATKAN OLEH LUAPAN SUNGAI CITARUM.
16.	RW. 26	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.
17.	RW. 27	1. SUMBER DAYA MANUSIA YANG CUKUP BANYAK, AKAN TETAPI BELUM DITUNJANG DENGAN PENGHASILAN KELUARGA YANG MENCUKUPI UNTUK KEBUTUHAN SEHARI-HARI. 2. KREATIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA CUKUP, AKAN TETAPI BELUM DIDUKUNG DENGAN SARANA DAN PRASARANA YANG MEMADAI. 3. BANTUAN PEMERINTAH YANG DITERIMA BELUM DAPAT MENYENTUH SEMUA ASPEK KEBUTUHAN, BAIK INFRASTRUKTUR, MODAL, ATAUPUN PELATIHAN. 4. HOME INDUSTRI DI BIDANG MEUBELAIR MASIH DIKELOLA SECARA TRADISIONAL DAN SERING TERKENDALA DENGAN MODAL, ALAT, MAUPUN PEMASARAN. 5. BELUM EPEKTIFNYA PERANAN GENERASI MUDA DALAM MEMBANTU PERMASALAHAN YANG TIMBUL DIMASYARAKAT TERUTAMA YANG MENYANGKUT KEADAAN SOSIAL. 6. MASIH BANYAK SARANA INFRASTRUKTUR YANG BELUM MEMADAI TERUTAMA UTK JALAN, KEBERSIHAN DAN SUMBER AIR BERSIH.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun Berjalan

Diatas telah disampaikan, bahwa kepala desa adalah unsur utama (Domain) pelaksana pemerintahan desa, yang harus menggambarkan dan bisa melaksanakan 5 (lima) prinsip ***(Keanekaragaman, Partisifasi, Otonomi Asli, Demokrasi dan pemberdayaan mayarakat)*** dalam berbagai tindakan dan pemikirannya melalui keputusan-keputusannya, dalam rangka memberikan kebebasan, penggalangan dan penggalian partisifasi serta pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat desa lebih maju, sejahtera pada berbagai aspek kehidupan.

1. Mengintensifkan dan mengamankan potensi sumber pendapatan desa, dengan cara lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa, baik yang berasal dari Sumber Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Kabupaten, Provinsi, Pusat maupun bantuan dari pihak ketiga, sehingga dapat direalisasikan dan diimplemtasikan bagi kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan infrastruktur perdesaan.
2. Menata administrasi desa, RW, RT melalui cara optimalisasi fungsi dan tugas aparat pelaksananya sehingga tercipta sebuah tatanan administrasi pemerintahan yang baik, akuntabilitas, terstruktur dengan didukung oleh sarana dan prasarana penunjangnya.
3. Menumbuhkembangkan pembinaan serta menggali potensi keagamaan melalalui kerjasama dengan DKM, MUI, DMI, Ulama dan Pembina keagamaan.
4. Menumbuhkembangkan pembinaan potensi seni dan budaya yang sudah ada, atau penciptan seni dan budaya baru yang berorientasi pada kemajuan dan pembendaharaan seni maupun budaya yang tidak bertentangan dengan adat maupun kebiasaan warga masyarakat serta tetap mempertahankan kearipan budaya lokal.
5. Menumbuhkembangkan dan membina potensi olahraga, dengan cara lebih meningkatkan minat serta apresiasi para pemuda terhadap bidang olahraga dan berupaya untuk memfasilitasinya baik dari kegiatan, sarana maupun pendanaannya.
6. Menumbuhkembangkan potensi ekonomi kerakyatan yang sudah ada seperti pengrajin topi, makanan, meubel dan berusaha menggali dan menciptakan sumber-sumber perekonomian yang baru sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang.
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban melalui upaya pembinaan, dan peningkatan kesadaraan pengamanan swakarsa atau bekerjasama dengan pihak-pihak lain.

Rencana Strategis Desa, merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan di desa, serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan di desa secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBDes, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga dengan mengutamakan dan memperhatikan kewenangan yang dimiliki serta sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Dokumen rencana strategis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 didalamnya mengandung dan menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Desa. Dengan demikian perencanaan strategis harus disusun melalui proses secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya kondisi dan potensi, terutama dalam rangka meningkatkan efesiensi serta efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Untuk dapat melaksanakan Rencana Strategis yang sudah disusun, didalamnya akan sangat membutuhkan unsur-unsur atau sub-sub sistem yang harus ada, diantaranya :

a. Manusia ;

Manuia sebagai perencana, pelaksana, penanggungjawab, pengguna dari seluruh rencana yang ada, maka dalam rekrutmen manusianya terutama sebagai unsur perencana maupun pelaksana secara langsung harus dikondisikan dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

b. Tujuan ;

Sangat menentukan tugas-tugas apa yang harus dilaksanakan dan bagaimana kerjasama serta apa alat atau sarananya, dengan kata lain pencapaian tujuan akan dipengaruhi oleh bagaimana pelaksanaan tugas, kerjasama dan sarananya.

c. Tugas ;

Tugas akan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tujuan, manusia, tugas dan sarananya.

d. Kerjasama ;

Akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tujuan, manusia, tugas dan sarana.

e. Sarana ;

Sangat dipengaruhi oleh dan mempengaruhi tujuan, manusia, tujuan, kerjasama. Sarana meliputi dana, alat dan tempat kerja dan lain-lain.

Dari Visi Desa sebagaimana telah disampaikan diatas, maka telah ditetapkan rencana strategis dan kebijakan desa sebagai berikut :

4.1.1 **Mengintensifkan dan mengamankan potensi sumber pendapatan desa.**

Pemerintahan yang baik dan bersih adalah pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bertanggungjawab, efesien, efektif, demokratis, transparan, akuntabel dan adil.

Strategi :

1. Mendata sumber pendapatan yang terdapat di Desa Mekarrahayu.
2. Melakukan pendekatan dengan para pemlik toko, pengrajin, pengusaha, dan lain-lain.
3. Meluruskan status pasar Mekarrahayu
4. Mencegah terjadinya kebocoran dana dan pengalokasian dana yang tepat.

Tujuannya yang ingin dicapai :

"Menggali potensi sumber-sumber pendapatan Desa, baik dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Kabupaten, Provinsi, Pusat dan Pihak ketiga, serta mengamankannya sehingga dana yang tersedia dapat dipergunakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkannya.

Meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan desa dan meningkatkan Transparansi serta Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik pelayanan dalam bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun Pembangunan."

Sasaran / Target ;

1. Memperoleh sejumlah pendapatan desa yang kongkrit dan tetap setiap bulan.
2. Tersedia dana bagi pemerataan pembangunan dan atau pemeliharaan
3. sarana/prasarana di tiap dusun, RT, RW.
4. Tersedia dana bagi bantuan sosial, kegiatan masyarakat, dan sebagainya.
   Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan
5. kualitas pelayanan.
6. Terbangunnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara,
   Terwujudnya mekanisme kontrol dari anggota maupun kelompok masyarakat yang

7. lebih terbuka dan bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan.
8. Terwujudnya partisifasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
9. Memulihkan keparcayaan masyarakat terhadap aparatur desa.
10. Menumbuhkembangkan, menggali dan memberdayakan seluruh kekuatan dan potensi yang ada pada masyarakat.
    Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan mengandalkan berbagai sumber dana dan penggalian potensi sumberdaya masyarakat.

4.1.2 Menata kembali administrasi Desa, RW, RT termasuk kependudukan:

Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa seperti RW, RT sangat penting keberadaannya dalam rangka membantu pelaksanaan dan pencapaian program yang telah ditentukan.
Fungsi dan legalitas lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai mitra pemerintahan desa, baik dalam hal legalitas, teknis maupun perencanaan.

Strategi :

1. Data kependudukan RT/RW.
2. Registrasi penduduk musiman
3. Penertiban rumah-rumah kontrakan.
4. Memfungsikan kembali peran RT/RW.

Tujuannya yang ingin dicapai :

Semakin optimalnya kinerja dan propesional lembaga desa, yang menyadari akan fungsi serta tugasnya masing-masing dalam rangka membantu pemerintahan desa untuk mempercepat pencapaian tujuan dan rencana yang telah disepakati bersama.

Sasaran / Target ;

1. Memudahkan akurasi data penduduk
2. Pengontrolan penduduk musiman, lahir dan mati.
3. Pengontrolan penduduk di bawah garis kemiskinan.
4. Terciptanya penguatan kapasitas kelembagaan desa melalui peningkatan eksistensi, peran serta dan legalitasnya.
5. Terwujudnya suatu tatanan kelembagaan yang senantiasa mengedepankan pemahaman tugas dan pungsinya secara propesional.
6. Terciptanya kelembagaan usaha ekonomi desa, badan Usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya.
7. Terwujudnya Lembaga sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat.
8. Tercapainya penataan kelembagaan yang proporsional dalam hal kepengurusan, wilayah kerja, administrasi dll.

4.1.3 Membina dan mengembangkan potensi keagamaan;

Sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang pembangunan agama dalam kehidupan masyarakat.
Menggali dan menumbuh kembangkan nilai-nilai kebersamaan dan memantapkan aktualisasi pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat.

Strategi :

1. Menjalin kerja sama dengan ormas-ormas keagamaan dan para pengurus DKM se-Desa Mekarrahayu.
2. Menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama dan KUA.

3. Menyelenggarakan silaturahmi secara periodik antar sesama tokoh agama (ulama) lintas ormas, pimpinan ormas keagamaan, tokoh masyarakat dan sebagainya.

Tujuannya yang ingin dicapai :

Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap sisi kehidupan dan memantapkan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.

Dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat, setiap aktivitas akan dilandasi niat yang baik agar bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.

Sasaran/Target :

1. Terciptanya masyarakat desa Mekarrahayu yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Terwujudnya sistem kelembagaan pelayanan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.
3. Terciptanya suasana kehidupan keagamaan yang kondusif bagi pengamalan ajaran agama masing-masing.
4. Meningkatkan kesadaran untuk menegakan etika dalam penyebaran agama.
5. Meningkatkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam bermasyarakat.

4.1.4 Membina dan mengembangkan potensi seni dan budaya.

Kesenian dan kebudayaan merupakan sebuah suatu kegiatan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pada kenyataan kesenian dan kebudayaan dapat berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan pola dan daya pikir manusia, karena kesenian dan kebudayaan merupakan buah pikiran dan prilaku manusia yang diapresiasikan pada bentuk atau karekter tertentu.

Oleh kerana itulah, keberadaan kesenian dan kebudayaan dimasyarakat sangat perlu untuk diarahkan dan difasilitasi agar keberadaannya tetap seimbang dengan kebutuhan manusia.

Strategi :

1. Melakukan pendekatan dengan para tokoh dan peminat seni, mencakup seni islami, tradisional, dan modern.
2. Mencarikan sponsor.
3. Mengangkat seni budaya daerah ke pentas yang lebih tinggi.
4. Mengupayakan membuka sanggar seni termasuk seni pencak silat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Menumbuhkembangkan dan menggali potensi seni dan budaya yang ada agar keberadaannya tetap bisa dipertahankan dengan tidak mengesampingkan kearifan budaya lokal.

Sasaran/Target :

1. Desa Mekarrahayu (tidak harus pemerintah desa) memiliki grup kesenian.
2. Tidak menutup kemungkinan pihak swasta membuka sanggar/grup seni untuk desa Mekarrahayu.

4.1.5 Membina dan mengembangkan potensi olahraga.

Secara pilosofis dewasa ini olahraga sudah merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia baik dari sudut pandang kesehatan rohani maupun jasmani. Maka dari itu keberadaannya sangat diperlukan dan perlu dilakukan pembinaan sehingga pada akhirnya dapat terwujud dalam bentuk prestasi.

Strategi :

1. Melakukan pendekatan dengan tokoh olah raga di desa Mekarrahayu
2. Mencarikan Sponsor
3. Pada waktu-waktu tertentu menyelenggarakan kegiatan olahraga yang dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat yang bersifat rekreasi, murah dan meriah.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Terciptanya tingkat kesehatan masyarakat dan menggali potensi ke rah prestasi.

Sasaran/Target:

1. Meningkatkan nilai kesehatan masyarakat.
2. Menggali dan menumbuhkembangkan potensi olahraga.
3. Memfasilitasi kegiatan olahraga sehingga berkembang menjadi prestasi.

4.1.6 Membina dan mengembangkan potensi pengrajin topi, makanan, meubelair.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata adalah melalui pendekatan yang bertumpu pada kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Strategi :

1. Memfasilitasi kerja sama antar pengrajin agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.
2. Membantu mencarikan kemudahan bagi pengembangan usaha kepada instansi terkait.
3. Mewadahi para pengrajin dalam koperasi pengrajin.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Mengembangkan ekonomi masyarakat yang akan dilaksanakan melalui keberpihakan serta dampaknya dapat langsung menyentuh pada masyarakat dengan lebih meningkatkan pelayanan pemerintahan desa dan memberdayakan serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Sasaran :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan dan menggali serta menumbuhkembangkan potensi ekonomi yang ada ataupun yang berupa bantuan dari pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2. Terciptanya peningkatan pelayanan dari pemerintah desa yang lebih baik, cepat, tepat dengan selalu memperhatikan dimensi waktu serta bobot kebutuhan dalam pelayanannya.
3. Terciptanya satu kondisi yang dapat menggali dan menumbuhkembangkan sumberdaya yang ada pada masyarakat serta memberikan kesempatan seluas-luasnya agar masyarakat dapat ikut dan turut serta dalam menentukan dan mengawasi berbagai langkah kebijakan yang telah ditentukan bersama-sama.
4. Tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi

4.1.7 Membina keamanan dan ketertiban.

Keamanan, ketertiban dan kedamaian merupakan tiga pilar kondisi masyarakat agar dapat menyelenggarakan kehidupan yang normal, sehingga dapat melangsungkan aktivitas tanpa rasa takut atau tertekan. Kondisi dinamis berarti aktivitas mayarakat dapat berubah, bergerak sesuai dengan tujuan pembangunan.

Strategi :

1. Memfungsikan aparat keamanan desa secara optimal dan proporsional.
2. Memanfaatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungan
3. Berkoordinasi dengan aparat terkait.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (Tramtibmas) ;

Sasaran/Target :

1. Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan berlangsungnya kehidupan sehari-hari warga masyarakat aman, tentram dan damai.
2. Terwujudnya pendayagunaan secara optimal dan terpadu segenap kekuatan potensi masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban.
3. Terwujudnyara kesadaran dan peran serta secara aktif segenap warga masyarakat akan kondisi keamanan.
4. Menumbuhkembangkan kesadaran dan memanfaatkan potensi bahwa keamanan merupakan kebutuhan bersama.

4.1.8 Meningkatkan kinerja pembangunan desa.

Konsekwensi pembangunan adalah pendayagunaan berbagai sumberdaya baik manusia atau dana. Jika tidak dilakukan secara bijaksana sumberdaya alam akan mengalami kepunahan.

Dalam kaitannya, pembangunan di berbagai bidang perlu adanya langkah akselerasi (Percepatan) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat banyak.

Strategi :

1. Optimalisasi tugas dan fungsi perangkat Desa.
2. Optimalisasi tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di desa.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Peningkatan kualitas komunikasi dan koordinasi diantara pemerintahan desa dengan lembaga kemasyarakatan di desa.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Meningkatkan kinerja berbagai pihak guna menciptakan akselerasi (Percepatan) pembangunan di berbagai sektor, baik sektor pembangunan Sumberdaya manusia, inprastruktur pedesaan dan sebagainya.

Sasarannya adalah :

1. Terwujudnya etos dan kinerja semua pihak mulai dari unsur aparatur Desa, Lembaga dan masyarakat.
2. Terciptanya suasana dan iklim yang harmonis diantara Pemerintahan Desa, Lembaga dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan berbagai kebijaksanaan pembangunan.
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang lebih layak dan baik, sehingga masyarakat akan sangat terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan tarap hidup.

4.1.9 Meningkatkan sumber daya manusia.

Untuk mendorong terciptanya masyarakat yang maju dan mandiri dalam rangka menghadapi era globalisasi, perlu terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas sekaligus produktifitas materil dan spiritual masyarakat. Peningkatan kualitas meliputi peningkatan kemampuan, kemandirian dan kepercayaan diri, keimanan dan ketaqwaan, serta kesehatan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari misi ini adalah :

Meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri dan kemandirian masyarakat, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sasarannya adalah :

1. Terselenggaranya peningkatan mutu pendidikan.
2. Terciptanya peningkatan angka partisifasi sekolah dan lama sekolah.
3. Terciptanya peningkatan angka partisifasi sekolah dan lama sekolah.
4. Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat.

Terwujudnya kemudahan dalam system pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terciptanya perilaku masyarakat yang mampu memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan serta berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini disusun berdasarkan kepada kondisi dan kebutuhan saat ini dan perkiraan dimasa lima tahun mendatang.

Walaupun penyusun sudah berusaha mengakomodir dan menyajikan segala kebutuhan dari berbagai aspek, berbagai sumber dengan mempertimbangan sumber dan kemampuhan keuangan desa baik yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Dari Kabupaten, Provinsi, Bantuan dari Pemerintah pusat maupun dari pihak ketiga, sehingga diharapkan semua yang telah dituangkan dalam Rencana Kegiatan Desa (RKP-Desa) ini bisa dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan masih ada hal-hal yang belum terakomodir dan dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan mengambil langkah dan kebijakan secara khusus, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi.

Semoga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ini dapat mencerminkan segala kebutuhan, dan dapat dijadikan sebuah acuan dalam kerangka melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintahan Desa baik dalam bidang Pembangunan, Pemerintahan maupun Kemasyarakatan.

Tentunya kami sangat menyadari dengan berbagai kekurangan dan yang masih ada pada penyajiannya, oleh karena itu sebagai wujud kecintaan dan keinginan kita agar Desa Mekarrahayu yang lebih maju, aman, tentram, sejahtera di berbagai aspek kehidupan, maka kami sangat mengharapkan adanya kritik, saran untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhirnya kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Alloh SWT, yang telah memberikan Taopiq dan Inayah-NYA, kepada Bapak Camat Margaasih beserta jajarannya, kepada Mitra Kerja, BPD, LPMD, dan tentunya tidak lupa kepada seluruh masyarakat Desa Mekarrahayu yang telah membantu sehingga Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun Anggaran 2016 ini dapat diselesaikan.

Semoga Alloh SWT, memberikan jalan dan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan dan mencapai apa yang dicita-citakan.

Ammin.

Bandung, 16 Januari 2016

Penyusun,

BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
(RPJM-Desa DAN RKP-Desa)

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan Musrenbang Desa Tahun 2016 di Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyusunan dan pembahasan RPJM-DESA dan RKP-DESA, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Selasa

Jam : 08.00 s/d 14.00 WIB

Tempat : Gedung Serbaguna Rukun Warga 12 Bumi Asri

Telah diselenggarakan Musrenbang Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsure lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik
   1. Penyusunan dan Pengesahan Rancangan RPJMDesa Tahun Anggaran 2015-2021.
   2. Penyusunan dan Pengesahan Rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2016.
   3. Penyusunan dan Pengesahan Rancangan APBDesa Tahun Angaran 2016.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: Ade Muhyi	dari Unsur Desa
Sekretaris Notulen	: Dedeh Jubaedah	dari Unsur Desa
Narasumber	: 1. Nurdin, S.Ip., M.Si	dari Unsur Kecamatan
Narasumber	: 2. Eni Purwantini, S.Sos., M.Si	dari Unsur Kecamatan
Narasumber	: 3. H. Herry Heryadi	dari Unsur Desa
Narasumber	: 4. H. Deden Supiyulloh	dari Unsur BPD
Narasumber	: 5. Apep Syape'i	dari Unsur LPMD

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang *berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musrenbang Desa* yaitu :

1. Menyetujui dan mengesahkan rancangan RPJMDes Tahun 2015-2021 menjadi Peraturan Desa.
2. Menyetujui dan mengesahkan rancangan RKPDes Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa.
3. Menyetujui dan mengesahkan rancangan APBDesa Tahun 2016 menjadi Peraturan Desa.

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mekarrahayu, 16 Januari 2016.

Pimpinan Musrenbang | Notulen/Sekretaris

ADE MUHYI | DEDEH JUBAEDAH

Mengetahui

Kepala Desa Mekarrahayu

H. HERRY HERYADI

Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil dan peserta Musrenbang Desa

No.	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	APEP SYAPE'I	KP. CICUKANG RW. 25	
2	H. AAN YUHANA	KP. BURUJUL RW. 05	
3	WAHYUDIN, ZA	KP. CICUKANG RW. 20	
4	R O N I	KP. CICUKANG RW. 25	
5	YAYA SUDIANA	KP. SUMUMPUT RW. 06	

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

H. HERRY HERYADI